

JURNAL

**PERAN KEDAMANGAN DALAM MENYELESAIKAN KONFLIK PEMANFAATAN
BUKIT PURUK KAMBANG ANTARA MASYARAKAT HUKUM ADAT SUKU
DAYAK SIANG DAN PT. INDO MURO KENCANA
(STUDI KASUS DI KABUPATEN MURUNG RAYA PROVINSI
KALIMATAN TENGAH)**



**Diajukan oleh:
Christy Madya Putri**

**NPM : 120510979
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pertanahan dan Lingkungan
Hidup**

**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
FAKULTAS HUKUM**

2016

**HALAMAN PERSETUJUAN
JURNAL**

**PERAN KEDAMANGAN DALAM MENYELESAIKAN KONFLIK PEMANFAATAN
BUKIT PURUK KAMBANG ANTARA MASYARAKAT HUKUM ADAT SUKU
DAYAK SIANG DAN PT. INDO MURO KENCANA
(STUDI KASUS DI KABUPATEN MURUNG RAYA PROVINSI
KALIMATAN TENGAH)**



**Diajukan oleh:
Christy Madya Putri**

NPM : 120510979
Program Studi : Ilmu Hukum
**Program Kekhususan : Hukum Pertanahan dan Lingkungan
Hidup**

Telah Disetujui Oleh Dosen Pembimbing

Pada tanggal 22 Juni 2016

Dosen Pembimbing

Dr. C. Woro Murdianti, S.H., M.Hum.

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Atma Jaya Yogyakarta



Dr. Endro Susilo, SH., LLM

**HALAMAN PENGESAHAN
JURNAL**

**PERAN KEDAMANGAN DALAM MENYELESAIKAN KONFLIK PEMANFAATAN
BUKIT PURUK KAMBANG ANTARA MASYARAKAT HUKUM ADAT SUKU
DAYAK SIANG DAN PT. INDO MURO KENCANA
(STUDI KASUS DI KABUPATEN MURUNG RAYA PROVINSI
KALIMATAN TENGAH)**



**Diajukan oleh:
Christy Madya Putri**

**NPM : 120510979
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pertanahan dan Lingkungan
Hidup**

Telah Disetujui Oleh Dosen Pembimbing

Pada tanggal 22 Juni 2016

Dosen Pembimbing

Dr. C. Woro Murdianti, S.H., M.Hum.

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Atma Jaya Yogyakarta



FX. Endro Susilo, SH., LLM

JURNAL

PERAN KEDAMANGAN DALAM MENYELESAIKAN KONFLIK PEMANFAATAN BUKIT PURUK KAMBANG ANTARA MASYARAKAT HUKUM ADAT SUKU DAYAK SIANG DAN PT. INDO MURO KENCANA

Penulis, Christy Madya Putri
Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta
Email : christymadyaputri@gmail.com

Abstract

The main idea of this research is What Is the Role of Kedamangan in Solving Area Utilization Conflict of Bukit Puruk Kambang between Dayak Siang Tribe and PT. Indo Muro Kencana. This research type is normative legal research. Kedamangan role in resolving the conflict utilization of the heritage area of Bukit Puruk Kambang between Dayak Siang Customary Law Community and PT. Indo Muro Kencana in accordance with the duties and functions of Damang Chief of Adat Dayak based on customary laws and ordinances settling disputes or conflicts under customary law Dayak Siang. Kedamangan who is led by Damang Customary Head acts as representative of Dayak Siang Tribe customary society (indigeneous people), Damang custom Head play the role as leaders in conducting the customary oath to the PT. Indo Muro Kencana, Kedamangan led by Damang Customary Chief acts as the representative of a community of indigenous Dayak Siang in deliberation, Damang Head of Indigenous customary role as a judge in giving judgment and sanctions against PT. Indo Muro Kencana and Damang Customary Chief role as partners Dayak Customary Council Murung Raya in efforts to resolve the issue a decree Murung Raya No. 118.45 / 358/2013 on Stipulation largest Puruk Kambang as Cultural Heritage Region Murung Raya. Kedamangan also has done its part by Central Kalimantan Provincial Regulation No. 16 Year 2008 on Institutional Dayak in Central Kalimantan.

Keywords: *Kedamangan, Community Customary Law, Customary Law, Land Rights.*

1. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Di Kabupaten Murung Raya, khususnya di wilayah kecamatan Tanah Siang Selatan terdapat Kelembagaan Adat Dayak yang disebut dengan Kedamangan. Masyarakat yang menempati wilayah tersebut adalah masyarakat hukum adat Suku Dayak Siang. Suku Dayak Siang memiliki suatu wilayah keramat yang merupakan tanah adat milik bersama. Tanah adat dari masyarakat adat Suku Dayak Siang tersebut merupakan situs kepurbakalaan yang sudah terdaftar dalam Daftar Inventaris Situs atau Benda Cagar Budaya Kalimantan Tengah sejak tahun 1993. Namun faktanya kawasan yang dijadikan sebagai kawasan Bukit Puruk Kambang digunakan juga sebagai kawasan pertambangan PT. Indo Muro Kencana dengan dasar kontrak karya (KK) dari pemerintah pusat.

Faktor penyebab konflik antara masyarakat hukum adat Suku Dayak Siang

dengan PT. Indo Muro Kencana adalah perbedaan kepentingan. Bukit Puruk Kambang yang merupakan hak ulayat masyarakat hukum adat Suku Dayak Siang mulai ditambang awal bulan Agustus tahun 2012 lalu. Kegiatan penambangan yang dilakukan di kawasan yang dianggap keramat tersebut memunculkan konflik antara pihak masyarakat hukum adat Suku Dayak Siang dengan PT. Indo Muro Kencana. Masyarakat hukum adat Suku Dayak Siang menganggap kegiatan pertambangan di kawasan keramatnya adalah suatu bentuk pelanggaran adat yang berarti pihak perusahaan tidak menghargai keberadaan dan hak ulayat masyarakat hukum adat Suku Dayak Siang. Kegiatan penambang yang dilakukan oleh PT. Indo Muro Kencana di Bukit Puruk Kambang, banyak menjadi perhatian baik dari Instansi Pemerintah Daerah maupun dari

Kelembagaan Adat Dayak yaitu Kedamangan.

Konflik pemanfaatan Bukit Puruk Kambang antara masyarakat hukum adat Suku Dayak Siang dan PT. Indo Muro Kencana, dalam penyelesaiannya terdapat peran dari Kelembagaan Adat Dayak yaitu Kedamangan. Berdasarkan dari latar belakang masalah tersebut, maka penulisan skripsi ini mengambil judul Peran Kedamangan dalam Menyelesaikan Konflik Pemanfaatan Bukit Puruk Kambang antara Masyarakat Hukum Adat Suku Dayak Siang dan PT. Indo Muro Kencana.

Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang dikemukakan dalam penulisan hukum ini, yaitu bagaimanakah peran Kedamangan dalam menyelesaikan konflik pemanfaatan Bukit Puruk Kambang antara masyarakat hukum adat Suku Dayak Siang dan PT. Indo Muro Kencana ?

Tujuan

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui dan menganalisis peran kedamangan dalam menyelesaikan konflik pemanfaatan Bukit Puruk Kambang antara masyarakat hukum adat Suku Dayak Siang dan PT. Indo Muro Kencana.

Tinjauan Pustaka

A. Masyarakat Hukum Adat dan Hukum Adat

1. Masyarakat Hukum Adat

Pengertian masyarakat hukum adat sesuai ketentuan dalam Pasal 1 angka 3 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat adalah sekelompok orang yang terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum karena kesamaan tempat tinggal atau pun atas dasar keturunan.

Masyarakat hukum adat merupakan persekutuan yang mempunyai tata susunan yang teratur dan kekal serta memiliki pengurus sendiri dan kekayaan sendiri, baik kekayaan material (benda) maupun kekayaan immaterial (bukan benda).¹ Bentuk-

bentuk masyarakat hukum adat ditentukan oleh faktor yang berbeda antara daerah satu dengan daerah yang lain, yaitu adanya sekelompok orang yang terikat sebagai satu kesatuan. Satu kesatuan tersebut didasarkan pada faktor teritorial, genealogis dan teritorial-genealogis.² Masyarakat hukum adat memiliki pranata hukum adat yang mengatur kehidupan bersama kelompok, di dalamnya terdapat hukum adat yang mengandung unsur-unsur adat istiadat yang membentuknya. Masyarakat hukum adat memiliki kelembagaan dalam bentuk perangkat penguasa adat (struktur kelembagaan adat) yang masih berfungsi, yang memiliki kewibawaan dan kekuasaan yang didukung oleh masyarakat hukum adat tersebut.

2. Hukum Adat

Pasal 1 angka 17 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kalimantan Tengah mendefinisikan hukum adat adalah hukum yang benar-benar hidup dalam kesadaran hati nurani masyarakat dan tercermin dalam pola-pola tindakan mereka sesuai dengan adat istiadatnya dan pola-pola sosial budayanya yang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional.

Hukum adat adalah hukum yang sebagian besar tidak tertulis. Bentuknya yang tidak tertulis selaras dengan budaya masyarakat hukum adat di Indonesia yang berlandaskan pada budaya lisan atau budaya tutur. Di dalam sistem hukum adat, segala tindakan yang bertentangan dengan peraturan hukum adat merupakan tindakan *illegal*. Tindakan *illegal* adalah tindakan melanggar hukum. Apabila terjadi suatu pelanggaran hukum, maka petugas hukum (kepala adat, dan sebagainya) harus mengambil tindakan untuk memulihkan hukum yang dilanggar agar keseimbangan masyarakat tidak terganggu. Delik adat adalah :peristiwa atau perbuatan yang mengganggu keseimbangan masyarakat, dan

¹ Dominikus Rato, *Op. Cit.*, hlm. 106

² Hilman Hadikusuma, 2003, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 106-110.

dikarenakan adanya reaksi dari masyarakat maka keseimbangan itu harus dipulihkan kembali. Peristiwa atau perbuatan tersebut apakah berwujud atau tidak berwujud, apakah ditujukan terhadap manusia atau yang gaib, yang telah menimbulkan keconcangan dalam masyarakat harus dipulihkan dengan hukum denda atau dengan upacara adat³

Terjadinya delik adat apabila tata-tertib adat setempat dilanggar sehingga ada yang merasa dirugikan. Delik adat yang terjadi dalam suatu masyarakat harus dipulihkan, maka harus ada cara penyelesaian delik adat. Ada 4 (empat) cara penyelesaian delik adat yaitu :

- 1) Penyelesaian pribadi, keluarga dan tetangga;
- 2) Penyelesaian Kepala Kerabat atau Kepala Adat;
- 3) Penyelesaian Kepala Desa;
- 4) Penyelesaian Keorganisasian;

Selain menyelesaikan perkara dengan cara penyelesaian delik adat tersebut di atas, suatu perkara juga dapat diselesaikan dengan hukum adat peradilan. Hukum adat peradilan adalah aturan-aturan hukum adat yang mengatur tentang cara bagaimana berbuat untuk menyelesaikan suatu perkara dan atau untuk menetapkan keputusan hukum sesuatu perkara menurut hukum adat.⁴

B. Hak Ulayat

Hak ulayat diakui oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), tetapi pengakuan itu disertai 2 (dua) syarat yaitu mengenai “eksistensinya” dan mengenai “pelaksanaannya”, hak ulayat diakui sepanjang kenyataannya masih ada. Pelaksanaan hak ulayat diatur juga dalam Pasal 3 UUPA.⁵ Dalam perpustakaan hukum adat hak ulayat disebut dengan nama “*beschikkingsrecht*”.⁶ Hak ulayat didefinisikan dalam Pasal 1 ayat (1)

PMNA/KBPN Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat yaitu Hak ulayat dan yang serupa itu dari masyarakat hukum adat (untuk selanjutnya disebut hak ulayat), adalah kewenangan yang menurut hukum adat dipunyai oleh masyarakat hukum adat tertentu atas wilayah tertentu yang merupakan lingkungan hidup para warganya untuk mengambil manfaat dari sumber daya alam, termasuk tanah, dalam wilayah tersebut, bagi kelangsungan hidup dan kehidupannya, yang timbul dari hubungan secara lahiriah dan batiniah turun menurun dan tidak terputus antara masyarakat hukum adat tersebut dengan wilayah yang bersangkutan.

Berdasarkan Pasal 1 angka 14 Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak Kalimantan Tengah pengertian hak adat adalah hak untuk hidup dengan memanfaatkan sumber daya yang ada dalam lingkungan wilayah adat, berdasarkan adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan dan hukum adat, sebagaimana dikenal dalam lembaga-lembaga adat Dayak setempat. Dalam Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak Kalimantan Tengah, istilah tanah adat milik bersama dapat disejajarkan sebagai hak ulayat. Berdasarkan Pasal 1 angka 20 Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak Kalimantan Tengah pengertian tanah adat milik bersama adalah tanah warisan leluhur turun temurun yang dikelola dan dimanfaatkan bersama-sama oleh para ahli waris sebagai sebuah komunitas, dalam hal ini dapat disejajarkan maknanya dengan hak ulayat.

Sejak tanggal 12 Mei 2015, peraturan yang berlaku adalah Peraturan Menteri Negara Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat yang Berada dalam Kawasan Tertentu. Peraturan ini sebagai pembeding PMNA/KBPN Nomor 5

³ *Ibid.*

⁴ *Ibid.*, hlm 246

⁵ Boedi Harsono, 2005, *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang*

Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya, cetakan keduabelas, Djambatan, Jakarta, hlm. 190.

⁶ *ibid.* Hlm 186.

Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat, dalam peraturan ini tidak dikenal istilah hak ulayat, namun disebut dengan istilah hak komunal atas tanah, yang selanjutnya disebut hak komunal. Hak komunal menurut Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Negara Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat yang Berada dalam Kawasan Tertentu adalah Hak milik bersama atas suatu masyarakat hukum adat atau hak milik bersama atas tanah yang diberikan kepada masyarakat yang berada dalam kawasan hutan atau perkebunan.

Hak atas tanah dalam bentuk hak komunal dapat diberikan kepada masyarakat hukum adat maupun kelompok masyarakat yang berada dalam kawasan tertentu yang memenuhi persyaratan dapat diberikannya hak atas tanah. Masyarakat hukum adat harus memenuhi persyaratan untuk di kukuhkan hak atas tanahnya berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat yang Berada dalam Kawasan Tertentu, yaitu :

- a. Masyarakat masih dalam bentuk paguyuban;
- b. Ada kelembagaan dalam perangkat penguasaan adatnya;
- c. Ada wilayah hukum adat yang jelas;
- d. Ada paranata dan perangkat hukum yang masih ditaati.

C. Kawasan Cagar Budaya

Kawasan cagar budaya di definisikan dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya yaitu satuan ruang geografis yang memiliki dua Situs Cagar Budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas. Kriteria satuan ruang geografis dapat ditetapkan sebagai Kawasan Cagar Budaya berdasarkan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 11

Tahun 2010 tentang Cagar Budaya adalah apabila:

- a. mengandung 2 (dua) Situs Cagar Budaya atau lebih yang letaknya berdekatan;
- b. berupa lanskap budaya hasil bentukan manusia berusia paling sedikit 50 (lima puluh) tahun;
- c. memiliki pola yang memperlihatkan fungsi ruang pada masa lalu berusia paling sedikit 50 (lima puluh) tahun;
- d. memperlihatkan pengaruh manusia masa lalu pada proses pemanfaatan ruang berskala luas;
- e. memperlihatkan bukti pembentukan lanskap budaya; dan
- f. memiliki lapisan tanah terbenam yang mengandung bukti kegiatan manusia atau endapan fosil.

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya disebutkan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan setiap orang dapat memanfaatkan Cagar Budaya untuk kepentingan agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan pariwisata. Kawasan Cagar Budaya hanya dapat dimiliki dan/atau dikuasai oleh Negara, kecuali yang secara turun-temurun dimiliki oleh masyarakat hukum adat. Benda, bangunan, struktur, lokasi, atau satuan ruang geografis yang atas dasar penelitian memiliki arti khusus bagi masyarakat atau bangsa Indonesia, tetapi tidak memenuhi kriteria Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai 10 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya dapat diusulkan sebagai Cagar Budaya.

Cagar Budaya memiliki kriteria pemeringkatan, pemeringkatan Cagar Budaya ini dimaksud untuk pembagian tanggung jawab terhadap pengelolaan Cagar Budaya antara pemerintah nasional, pemerintah provinsi, dan pemerintah kota/kabupaten terkait dengan diberlakukannya sistem otonomi daerah. Pemeringkatan ini memberikan dampak positif, pemantauan dan pengambilan kebijakan terhadap pengelolaan Cagar Budaya lebih mudah

dan cepat dilakukan.⁷ Syarat tiap-tiap pemeringkatan Cagar Budaya disebutkan dalam Pasal 42 sampai Pasal 44 Undang-Undang No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya.

Berdasarkan Pasal 44 Undang-Undang No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, Cagar Budaya dapat ditetapkan menjadi Cagar Budaya peringkat kabupaten/kota apabila memenuhi syarat:

- a. sebagai Cagar Budaya yang diutamakan untuk dilestarikan dalam wilayah kabupaten/kota;
- b. mewakili masa gaya yang khas;
- c. tingkat keterancamannya tinggi;
- d. jenisnya sedikit; dan/atau
- e. jumlahnya terbatas.

Pemeringkatan Cagar Budaya untuk tingkat nasional ditetapkan dengan Keputusan Menteri, tingkat provinsi dengan Keputusan Gubernur, atau tingkat kabupaten/kota dengan Keputusan Bupati/Wali Kota.

2. METODE

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Dalam penelitian ini dilakukan analisis data yaitu melalui proses deskripsi, analisis, dan interpretasi. Penelitian ini berfokus pada peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Peran Kademangan selaku bagian dari Kelembagaan Adat Dayak, Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat, dan Cagar Budaya. Metode pengumpulan data penulisan normatif dikumpulkan melalui :

- a. Studi Kepustakaan, dilakukan untuk mempelajari bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder yang berupa buku-buku literatur, karya ilmiah, artikel hasil penelitian, dan bentuk karya ilmiah lainnya.
- b. Wawancara dengan narasumber, wawancara dalam penelitian ini dilakukan secara langsung kepada narasumber dengan mengajukan pertanyaan yang sudah disiapkan.

Metode yang digunakan dalam menganalisis data adalah deskriptif

kualitatif. Deskriptif yaitu menganalisis data dengan cara memaparkan secara terperinci dan tepat tentang suatu permasalahan atau fenomena terkait dengan permasalahan tersebut. Kualitatif yaitu menganalisis pemaparan hasil penelitian yang didapat dari narasumber untuk dapat menjelaskan permasalahan ini agar bisa diatasi.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Latar Belakang Konflik

Kabupaten Murung Raya adalah kabupaten yang kaya akan hasil tambang. Wilayah pertambangan Kabupaten Murung Raya berdasarkan KEPMEN ESDM Nomor 4003.K/30/MEM/2013 terbagi menjadi Wilayah Pencadangan Negara (WPN) dan Wilayah Usaha Pertambangan (WUP). PT. Indo Muro Kencana adalah perusahaan tambang emas dan perak beroperasi di 3 (tiga) kecamatan yaitu di Kecamatan Tanah Siang Selatan, Kecamatan Sungai Babuat dan Kecamatan Permata Intan. PT. Indo Muro Kencana beroperasi atas dasar Kontrak Karya (KK) perjanjian generasi ke III dengan Pemerintah RI Nomor B-07/Pres/I/1985 tanggal 27 Februari 1985, yang berlaku selama 30 tahun yakni hingga awal tahun 2015, terkait dengan segala perijinan atau operasinya PT. Indo Muro Kencana menjadi kewenangan pemerintah pusat.

Konflik antara masyarakat hukum adat Suku Dayak Siang dengan PT. Indo Muro Kencana mulai memanasi pada awal bulan Agustus tahun 2012 yang lalu. Perbedaan kepentingan antara para pihak menjadi latar belakang terjadinya konflik ini. Di tahun 2012, PT. Indo Muro Kencana mulai melakukan penambangan di kawasan yang merupakan hak ulayat masyarakat hukum adat Suku Dayak Siang. Akibat kegiatan penambangan, terbentuklah lubang-lubang galian dan pencemaran air sungai di sekitar kawasan yang telah ditambang. Selain itu, Bukit Puruk Kambang berada di Desa Oreng, Kecamatan Tanah Siang Selatan, Kabupaten Murung Raya merupakan situs kepubakalaan yang sudah terdaftar dalam Daftar Inventaris Situs atau Benda

⁷ Lolita Refani Lumban Tobing, 2012, *Penilaian Cagar Budaya Istana Maimun*, Universitas Indonesia, hlm. 41.

Cagar Budaya Kalimantan Tengah sejak tahun 1993.⁸

Bukit Puruk Kambang yang diyakini sebagai wilayah keramat bagi masyarakat hukum adat Suku Dayak Siang merupakan kawasan pertambangan PT. Indo Muro Kencana. Status awal dari tanah yang dijadikan kawasan tambang PT. Indo Muro Kencana adalah sebagian merupakan tanah negara (hutan negara) dan sebagian merupakan kawasan hutan yang merupakan tanah adat milik bersama (hak ulayat) dan tanah adat milik perorangan berupa ladang yang digarap oleh penduduk sekitar sebagai mata pencaharian. Bukit Puruk Kambang atau Gunung Kambang berada di kawasan hutan tanah adat milik bersama masyarakat hukum adat Suku Dayak Siang di Desa Oren, Kecamatan Tanah Siang Selatan, Kabupaten Murung Raya. Kawasan Bukit Puruk Kambang juga merupakan kawasan tambang PT. Indo Muro Kencana yaitu kawasan Bukit Puruk Kambang yang merupakan tanah adat milik bersama atau hak ulayat milik masyarakat hukum adat Suku Dayak Siang

Terjadinya tumpang tindih terhadap pemanfaatan tanah yang sama sebagai kawasan pertambangan dan hak ulayat masyarakat hukum adat terjadi karena pemberian kewenangan perijinan (Kontrak Karya) dilakukan oleh pemerintah pusat, sementara dalam proses pemberian perijinan tidak melakukan kajian lingkungan dan budaya dan melibatkan masyarakat lokal sehingga berdampak pada ketidaktahuan bahwa Bukit Puruk Kambang merupakan tanah adat/tempat keramat yang dipercaya oleh masyarakat dayak. Selain konflik disebabkan oleh kawasan keramat, yang ditambang PT. Indo Muro Kencana, masyarakat hukum adat dianggap tidak berhak atas kekayaan alam yang berada di dalam wilayah adatnya.. Masyarakat setempat terpaksa melakukan penambangan dengan cara tradisional dan sembunyi-sembunyi

(*illegal*). Pihak perusahaan tambang tidak mempekerjakan masyarakat hukum adat dengan alasan keterbatasan kemampuan yang dimiliki. Tindak kekerasan kemudian dilakukan oleh PT. Indo Muro Kencana terhadap masyarakat lokal yang melakukan penambangan secara *illegal* di kawasan tambangnya. Tindakan kekerasan tersebut berakhir dengan 2 (dua) korban jiwa, yang menambah kemarahan warga sekitar.⁹

Bagi masyarakat hukum adat Suku Dayak Siang, penambangan di kawasan yang dianggap keramat atau suci oleh masyarakat adat merupakan delik adat. Peristiwa atau perbuatan yang mengganggu keseimbangan masyarakat, dan dikarenakan adanya reaksi dari masyarakat maka keseimbangan itu harus dipulihkan kembali. Kedemangan yang dipimpin oleh Damang Kepala Adat melalui Kerapatan Mantir/Let Perdamaian Adat didukung oleh Dewan Adat Dayak bertugas menyelesaikan sengketa/konflik dalam masyarakat hukum adat dengan tata cara penyelesaian sengketa/konflik menurut hukum adat Dayak yang berlaku di wilayah kedemangan tersebut yaitu Hukum Adat Suku Dayak Siang.

b. Upaya Penyelesaian Konflik

1) Upaya Penyelesaian Konflik oleh Masyarakat Hukum Adat Suku Dayak Siang

Masyarakat hukum adat Suku Dayak Siang ingin mempertahankan hak ulayatnya berupa tanah adat yang berada di kawasan Bukit Puruk Kambang. Sedangkan PT. Indo Muro Kencana ingin mempertahankan kawasan tambangnya yang juga berada di kawasan Bukit Puruk Kambang. Tata cara penyelesaian sengketa atau konflik dalam masyarakat hukum adat Suku Dayak Siang berlaku sama bagi masyarakat lokal maupun bagi masyarakat yang datang dari luar daerah, baik yang menetap maupun yang datang dari luar daerah, baik yang

⁸ Wawancara tanggal 18 Januari 2016, di Puruk Cahu dengan Kepala Dinas Pariwisata Seni Budaya Pemuda dan Olahraga Kabupaten Murung Raya

⁹ Wawancara tanggal 20 Januari 2016, di Puruk Cahu dengan Ketua Harian Dewan Adat Dayak Kabupaten Murung Raya

menetap maupun yang menetap sementara wajib mempelajari dan menghormati adat istiadat dan hukum adat suku Dayak Siang.

Menurut tata cara penyelesaian konflik menurut hukum adat Suku Dayak Siang, sengketa atau konflik yang terkait dengan lingkup dan pelanggaran hukum adat Suku Dayak Siang diselesaikan dengan musyawarah perdamaian adat (non litigasi), dengan mengundang pihak yang besengketa oleh Kerapatan Mantir/Let Perdamaian Adat tingkat Kecamatan Tanah Siang Selatan yang dipimpin Damang Kepala Adat sebagai ketua. Damang Kepala Adat melalui Kerapatan Mantir/Let Perdamaian Adat mengundang para pihak yang terkait dalam konflik tersebut. Musyawarah perdamaian adat dilakukan di Desa Dirung Lingkin, Kecamatan Tanah Siang Selatan pada awal bulan Agustus 2012 dilakukan antara masyarakat hukum adat Suku Dayak Siang yang diwakili oleh Damang Kepala Adat dan PT. Indo Muro Kencana yang diwakili oleh Yudi Purwandi yaitu Kepala Hubungan Departemen antar Lembaga di PT. Indo Muro Kencana.

Dalam musyawarah kedua belah pihak saling memberikan informasi tentang masalah dan kepentingannya. Damang Kepala Adat menyampaikan aspirasi dari masyarakat hukum adat Suku Dayak Siang. Masyarakat hukum adat Suku Dayak Siang tidak menyetujui penambangan yang dilakukan oleh PT. Indo Muro Kencana, dikarenakan kawasan tambang tersebut merupakan hak ulayat masyarakat hukum adat yang dianggap keramat dan telah terbentuk lubang-lubang galian bekas penambangan serta pencemaran terhadap air sungai sekitar kawasan tambang akibat kegiatan penambangan. Masyarakat hukum adat Suku Dayak Siang ingin mempertahankan hak ulayatnya yang berupa tanah adat milik bersama agar tetap terjaga kelestariannya. PT. Indo Muro Kencana yang diwakili oleh Yudi Purwandi sebagai Kepala Hubungan Departemen antar Lembaga di PT. Indo Muro Kencana menyampaikan bahwa PT. Indo

Muro Kencana tetap mempertahankan kawasan tambang yang didasarkan kontrak karya dari pemerintah pusat yang memuat bahwa kawasan Bukit Puruk Kambang termasuk dalam kawasan tambang PT. Indo Muro Kencana. Pihak perusahaan tidak ingin melepaskan kawasan Bukit Puruk Kambang yang juga merupakan tanah adat masyarakat hukum adat Suku Dayak Siang karena di bawah tanah adat tersebut terdapat tambang emas yang belum digali.

Damang Kepala Adat selaku wakil dari masyarakat hukum adat Suku Dayak Siang mencoba memberikan solusi berupa penawaran yaitu PT. Indo Muro Kencana diperbolehkan menambang namun hanya di sekitar kawasan Bukit Puruk Kambang di luar penetapan wilayah kawasan cagar budaya. Pihak PT. Indo Muro Kencana juga diminta tetap menjaga kelestarian alam sekitar. Pihak PT. Indo Muro Kencana menolak. Penawaran untuk solusi tersebut tidak di idahkan, sehingga Damang Kepala Adat sebagai pimpinan adat memberikan keputusan yang saa dengan penawaran solusi sebelumnya, apabila dilanggar maka PT. Indo Muro Kencana akan diberikan sanksi.

Keputusan-keputusan yang telah ditetapkan bersifat final dan mengikat para pihak. Damang Kepala Adat sebagai hakim adat sekaligus ketua dari Kerapatan Mantir/Let Perdamaian Adat Kecamatan Tanah Siang yang berhak memberikan sanksi. Jenis sanksi yang dijatuhkan oleh Damang Kepala Adat melalui Kerapatan Mantir/Let Perdamaian Adat kepada pihak PT. Indo Muro Kencana adalah sumpah adat. Sumpah adat menurut hukum adat Suku Dayak Siang adalah sanksi yang paling berat. Damang Kepala Adat berperan sebagai Ketua dari Kerapatan Mantir/Let perdamaian Adat atau dapat disebut sebagai Hakim adat yang memberikan pertimbangan dan keputusan terhadap penyelesaian sengketa atau konflik.

Sumpah adat Suku Dayak Siang dilakukan dengan pemasangan "*hinting pali*" yaitu upacara sumpah adat dengan prosesi menyembelih babi yang kemudian dilakukan pemotongan kayu-

kayu rotan diatas hewan sembelihan disertai sumpah-sumpah adat dilakukan pada tanggal 28 Agustus 2012. Masyarakat hukum adat Suku Dayak Siang meyakini apabila pihak dari lawan mereka memang bersalah maka lawannya tersebut akan mendapat kesusahan atau musibah dalam berbagai bentuk baik yang terlihat maupun tidak terlihat. Damang Kepala Adat sebagai pimpinan adat, menjalankan tugasnya sebagai pimpinan adat dalam melakukan ritual-ritual adat dan memimpin berlangsungnya prosesi sumpah adat atau pemasangan *hinting pali*. Setelah dilaksanakan sumpah adat atau pemasangan *hinting pali* maka sengketa atau konflik antara masyarakat hukum adat Suku Dayak Siang dan PT. Indo Muro Kencana dianggap telah selesai dan damai menurut hukum adat Suku Dayak Siang.

2) Upaya Penyelesaian Konflik oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Murung Raya

Konflik antara masyarakat hukum adat Suku Dayak Siang dan PT. Indo Muro Kencana juga menjadi perhatian pemerintah daerah (pemda) Kabupaten Murung Raya. Penyelesaian secara hukum adat dianggap selesai oleh Damang Kepala Adat, namun pihak PT. Indo Muro Kencana tidak mengidahkan keputusan yang telah diberikan oleh Damang Kepala Adat sebagai hakim adat, maka Damang Kepala Adat Kecamatan Tanah Siang Selatan pada waktu itu menyerahkan permasalahan ini kepada Dewan Adat Dayak Kabupaten Murung Raya. Damang Kepala Adat di sini berperan sebagai mitra dari Dewan Adat dayak Kabupaten Murung Raya. Damang Kepala Adat Kecamatan Tanah Siang Selatan diwakili oleh Dewan Adat Dayak Kabupaten Murung Raya mengupayakan agar permasalahan ini dapat ditangani oleh pemerintah daerah yaitu bupati Murung Raya. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah agar kawasan Bukit Puruk Kambang tersebut dapat terjaga kelestarian dan keberadaannya maka bupati Murung Raya pada saat itu mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Murung Raya

Nomor 118.45/358/2013 tentang Penetapan Situs Puruk Kambang sebagai kawasan cagar budaya Kabupaten Murung Raya

Berdasarkan Pasal 44 Undang-Undang No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, cagar budaya dapat ditetapkan menjadi cagar budaya peringkat kabupaten/kota apabila memenuhi syarat:

- a. sebagai cagar budaya yang diutamakan untuk dilestarikan dalam wilayah kabupaten/kota; Bukit Puruk Kambang termasuk dalam wilayah Kabupaten Murung Raya.
- b. mewakili masa gaya yang khas; merupakan tanah yang dianggap keramat bagi masyarakat hukum adat Suku Dayak Siang, karena menurut mitos masyarakat hukum adat awalnya berasal dari Bukit Puruk Kambang yang kemudian hidup menyebar disekitaran Bukit Puruk Kambang.
- c. tingkat keterancamannya tinggi; karena dilakukan penambangan oleh PT. Indo Muro Kencana. Penambangan yang dilakukan adalah dengan cara menggali tanah, yang dapat menyebabkan rusaknya kawasan Bukit Puruk Kambang.
- d. jenisnya sedikit dan/atau jumlahnya terbatas; di wilayah Kabupaten Murung Raya, Bukit Puruk Kambang yang dipercayai masyarakat adat setempat sebagai mitos asal usul masyarakat hukum adat setempat yaitu suku Dayak Siang.

Terpenuhinya kriteria suatu Cagar Budaya dapat ditetapkan menjadi Cagar Budaya peringkat kabupaten/kota berdasarkan Pasal 44 dan Pasal 10 Undang-Undang No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, maka ditegaskan kembali Kawasan Cagar Budaya Bukit Puruk Kambang dapat ditetapkan menjadi kawasan cagar budaya peringkat kabupaten/kota. Kawasan cagar budaya Bukit Puruk Kambang ditetapkan seluas 1000 meter dari kaki bukit Puruk Kambang. Perlindungan kawasan cagar budaya Bukit Puruk Kambang berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya

dilakukan dengan cara menetapkan batas-batas keluasan untuk dimanfaatkan ruang melalui sistem zonasi yang meliputi Zona Inti, Zona Penyangga, Zona Pengembang, dan Zona Penunjang. Pemanfaatan zona pada Cagar Budaya dapat dilakukan untuk tujuan rekreatif, edukatif, apresiatif dan religi. Kawasan cagar budaya Bukit Puruk Kambang adalah kawasan cagar budaya tingkat kabupaten/kota dengan Keputusan Bupati/Wali Kota yang disahkan dengan dasar hukum Keputusan Bupati Murung Raya Nomor 118.45/358/2013 pada tanggal 5 Juli 2013 tentang Penetapan Situs Puruk Kambang sebagai Kawasan Cagar Budaya Kabupaten Murung Raya.¹⁰

Setelah dilaksanakannya upaya penyelesaian konflik menurut hukum adat suku Dayak Siang, PT. Indo Muro Kencana mengalami kejadian-kejadian yang bersifat mistis yang terjadi pada para pekerja di PT. Indo Muro Kencana. Perusahaan juga mengalami kebakaran yang mengakibatkan perusahaan menjadi rugi besar, hingga akhirnya pada tahun 2013. PT. Indo Muro Kencana mengalami kebangkrutan, yang kemudian menghentikan kegiatan pertambangannya dan dijual. Setelah upaya melalui penyelesai hukum adat suku Dayak Siang, dan upaya dari pemerintah daerah dengan adanya Surat Keputusan Bupati Murung Raya Nomor 118.45/358/2013 pada tanggal 5 Juli 2013 tentang Penetapan Situs Puruk Kambang sebagai Kawasan Cagar Budaya Kabupaten Murung Raya masalah dianggap selesai karena PT. Indo Muro kencana tidak melakukan kegiatan penambangan di kawasan Bukit Puruk Kambang.¹¹

c. Peran Kademangan Dalam Menyelesaikan Konflik

Peran Kademangan dalam menyelesaikan konflik pemanfaatan Bukit Puruk Kambang antara masyarakat hukum adat Suku Dayak Siang dengan PT. Indo Muro Kencana, dapat dilihat dari upaya penyelesaian sengketa atau konflik menurut hukum adat suku Dayak Siang. Ada 4 (empat) peran Damang Kepala Adat yang dapat kita simpulkan, yaitu:

1. Damang Kepala Adat berperan sebagai wakil dari masyarakat hukum adat Suku Dayak Siang. Damang Kepala Adat dalam hal ini mewakili masyarakat hukum adat Suku Dayak Siang dalam musyawarah penyelesaian adat, antara masyarakat hukum adat Suku Dayak Siang dan PT. Indo Muro Kencana. Damang Kepala Adat menyampaikan aspirasi dari masyarakat hukum adat dalam musyawarah penyelesaian adat.
2. Damang Kepala Adat berperan sebagai Hakim Adat dan sekaligus sebagai ketua dari Kerapatan Mantir/Let Perdamaian Adat. Damang Kepala Adat berperan sebagai ketua dalam hal memimpin berlangsungnya upaya penyelesaian melalui Kerapatan Mantir/Let Perdamaian Adat Kecamatan Tanah Siang Selatan. Damang Kepala Adat melalui Kerapatan Mantir/Let Perdamaian Adat memberikan sanksi bagi PT. Indo Muro kencana karena tidak mengidahkan keputusan yang telah dibuat Damang Kepala Adat pada saat itu selaku pimpinan adat. Keputusan-keputusan yang telah ditetapkan bersifat final dan mengikat para pihak.
3. Damang Kepala Adat berperan sebagai pimpinan adat masyarakat hukum adat Suku Dayak Siang. Damang Kepala Adat memberikan keputusan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat hukum adat Suku Dayak Siang seperti dalam hal yang dianggap mengganggu keseimbangan hidup dalam masyarakat hukum adat. Damang Kepala Adat juga berperan sebagai pemimpin adat dalam melakukan hal-hal yang berkaitan dengan ritual adat.

¹⁰ Wawancara tanggal 18 Januari 2016, di Puruk Cahu dengan Kepala Dinas Parwisata Seni Budaya Pemuda dan Olahraga Kabupaten Murung Raya

¹¹ Wawancara tanggal 20 Januari 2016, di Puruk Cahu dengan Ketua Harian Dewan Adat Dayak Kabupaten Murung Raya

Damang Kepala Adat berperan sebagai pimpinan adat pada saat melakukan Sumpah Adat atau pemasangan *hinting pali* pada PT. Indo Muro Kencana.

4. Damang Kepala Adat di sini berperan sebagai mitra dari Dewan Adat Dayak Kabupaten Murung Raya untuk menyelesaikan permasalahan antara masyarakat hukum adat Suku Dayak Siang dan PT. Indo Muro Kencana. Damang Kepala Adat Kecamatan Tanah Siang Selatan diwakili oleh Dewan Adat Dayak Kabupaten Murung Raya mengupayakan agar permasalahan ini dapat ditangani oleh pemerintah daerah yaitu bupati Murung Raya. Tugas Dewan Adat Dayak Kabupaten Murung Raya, membantu kelancaran tugas Damang Kepala Adat dalam menyelesaikan konflik antara masyarakat hukum adat Suku Dayak Siang dengan PT. Indo Muro Kencana.

Kedudukan Damang Kepala Adat semakin diperkuat dengan adanya Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak Di Kalimantan Tengah.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis dalam pembahasan, dapat disimpulkan Kedamangan yang dipimpin oleh Damang Kepala Adat berperan sebagai wakil dari masyarakat hukum adat Suku Dayak Siang dalam musyawarah, Damang Kepala Adat berperan sebagai pimpinan adat dalam melakukan sumpah adat terhadap PT. Indo Muro Kencana, Damang Kepala Adat berperan sebagai hakim adat dalam memberikan putusan dan sanksi terhadap PT. Indo Muro Kencana dan Damang Kepala Adat berperan sebagai mitra Dewan Adat Dayak Kabupaten Murung Raya dalam upaya penyelesaian masalah melalui Surat Keputusan Bupati Murung Raya Nomor 118.45/358/2013 tentang Penetapan Situs Puruk Kambang sebagai Kawasan Cagar Budaya Kabupaten Murung Raya. Kedamangan juga telah melakukan perannya berdasarkan

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kalimantan Tengah.

5. REFERENSI

- Boedi Harsono, 2005, *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, Cetakan Keduabelas, Djambatan, Jakarta
- Dominikus Rato, 2009, *Pengantar Hukum Adat*, Cetakan I, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta
- Djojodigono, 1964, *Asas-Asas Hukum Adat*, BP. Gajah Mada, Yogyakarta.
- Hilman Hadikusuma., 2003, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Mandar Maju, Bandar Lampung.
- Lolita Refani L.T, 2012, *Penilaian Cagar Budaya Istana Maimun*, Universitas Indonesia.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960, Nomor 104. Sekretariat Negara RI. Jakarta.
- Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010, Nomor 130. Sekretariat Negara RI. Jakarta.
- Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat.
- Peraturan Menteri Negara Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat yang Berada dalam Kawasan Tertentu.
- Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kalimantan Tengah. Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2008, Nomor 16. Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.